

LAPORAN PENELITIAN

Gregorius Sahdan

Modernisasi Ekonomi Politik Pedesaan¹

ABSTRACT

The following article depicts the impact of the implementation of modernization of rural's economic-politic (systems) in the new order era towards its natural resources, which had put them, the peasant community, in disadvantaged position, especially those belong to the poor groups of society, since they prioritized more on the preservation of the foreign investments which at the end led to the issue of the maintaining the status quo of the new order regime and their political interests; as well as illustration of the rural renewal strategy. (Keywords: economic modernization; rural politic, peasant community, New Order era).

Latar Belakang

Modernisasi ekonomi politik pedesaan, menjadi salah satu point penting komitmen ekonomi politik para pemimpin dunia, dalam pertemuan puncak World Food Summit: Five Years Later (WFS: fyl) di Roma-Italia, pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2002 lalu.² Modernisasi ekonomi politik pedesaan menjadi lokus pembicaraan, karena erat dengan masalah ketahanan pangan dan beban hidup petani yang sebagian besarnya tinggal di desa (Kompas, 11 Juni 2002).

Sekitar 183 negara dari berbagai penjuru dunia, yang tergabung dalam Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), bertekad memerangi

kelaparan dan kemiskinan dengan jalan modernisasi ekonomi politik pedesaan. Komitmen ini merupakan babak kedua dari komitmen yang sama, yang pernah disepakati oleh pemerintah dari berbagai negara, dalam Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia, pada tahun 1996. Sejak KTT pangan tahun 1974, para kepala negara, pemerintah, parlemen, partai politik, LSM dan bahkan masyarakat di seluruh kawasan dunia, mengkampanyekan usaha melawan kelaparan dan kemiskinan, yang nyaris menyebabkan jutaan penduduk di seluruh dunia menanggung beban hidup kesengsaraan dan ketidakberdayaan akibat kekurangan pangan.

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam seminar Pembaharuan Desa yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis STPMD "APMD" yang ke-38 di Gedung Seminar STPMD "APMD" tanggal 4-8 November 2003. Pokok-pokok pembahasan dalam tulisan ini, pernah disingung dalam artikel penulis di Sinar Harapan dan Suara Pembaruan pada Juni 2002.

² Pertemuan FAO di Roma dilihat sebagai modernisasi ekonomi politik, karena pertemuan tersebut (biasanya) melahirkan kebijakan penting dalam bidang ekonomi politik yang memberikan arah dan strategi bagi kebijakan ekonomi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya. Kebijakan Revolusi Hijau yang dijalankan oleh Indonesia tahun 1970-an merupakan salah satu implikasi dari kebijakan ekonomi politik yang disepakati oleh FAO di Roma tahun 1974. Kebijakan ekonomi politik ini telah mengalihkan sistem dan cara pertanian tradisional ke sistem modern di Indonesia. Penggunaan pupuk organik yang biasa digunakan dalam

FAO selalu menilai bahwa pokok persoalan kesengsaraan, keterbelakangan dan kemiskinan daerah pedesaan, terutama kerentanan mereka terhadap kelaparan dan rawan pangan, disebabkan oleh sistem dan cara pertanian yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk (terutama di negara-negara berkembang dan terbelakang), masih menggunakan cara dan sistem pertanian tradisional. Cara dan sistem pertanian tradisional ini menyebabkan petani di negara-negara berkembang dan terbelakang hanya mampu memproduksi hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani-petani di pedesaan, demikian FAO membutuhkan cara dan sistem pertanian modern.³ Sistem dan cara pertanian modern, termasuk penggunaan produk pertanian modern, seperti pupuk kimia, tanaman unggul, dan sebagainya dapat meningkatkan hasil-hasil pertanian di pedesaan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini saja tetapi juga untuk disimpan, ditabung, dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di musim paceklik atau di musim rawan pangan.

FAO juga memusatkan perhatian terhadap masyarakat di pedesaan, karena sekitar 70% dari total penduduk dunia yang miskin (tinggal di negara berkembang dan terbelakang) yang sebagian besar penduduknya menyandang predikat petani, dan sekitar 815 juta jiwa di antaranya menderita rawan pangan, kekurangan gizi, dan bahkan tidak memiliki daya tahan untuk hidup. Penyandang kekurangan

gizi yang paling banyak adalah anak-anak berjumlah sekitar 300-an juta jiwa dan 180 jiwa di antaranya nyaris tak berdaya menghadapi kematian setiap saat.⁴ Modernisasi ekonomi politik yang dirumuskan oleh *partnership* kolaborasi negara-negara maju dengan negara berkembang dan terbelakang ini, terbukti di beberapa negara dijalankan secara keliru tidak banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup penduduk di daerah pedesaan.

Masyarakat desa tetap masih terbelakang dan bahkan masih ada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Persoalannya adalah modernisasi ekonomi politik sebagai upaya untuk mengatasi rawan pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan di kebanyakan negara berkembang dan terbelakang dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan ekspansi kekuasaan dan penyebaran kapital. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang dan terbelakang memanfaatkan modernisasi ekonomi politik sebagai kesempatan untuk melakukan sentralisasi, intervensi, pengawasan-pengawasan atas masyarakat dan menciptakan birokrasi yang *rigid* dan kaku untuk menunjang perluasan kapital masuk desa. Akibatnya, daerah pedesaan di negara berkembang dan terbelakang dikooptasi dan dihegemoni oleh dua kekuatan besar yang mengatasnamakan modernisasi ekonomi politik yakni hegemoni kekuasaan dan eksploitasi kapital.⁵

³ Bagian ini merupakan cuplikan hasil sidang FAO di Roma tanggal 10-13 Juni 2003

⁴ Periksa *Kompas*, 14 Juni 2002

⁵ Filipina, Afrika Selatan, Indonesia merupakan beberapa negara yang keliru menerjemahkan modernisasi ekonomi politik sebagai kesempatan untuk melakukan ekspansi kekuasaan dan penguasaan atas aset-aset produksi di desa. Ini ditandai oleh kehadiran Marcos di Filipina, Mobutu Sese Seko di Afrika Selatan dan Soeharto di Indonesia. Ketiganya melakukan modernisasi ekonomi politik dalam bentuk sentralisasi, pengawasan

Filipina, Afrika Selatan, Indonesia, dan beberapa negara di Amerika Latin yang pernah dikuasai oleh pemerintahan otoriter merupakan contoh negara-negara yang memahami modernisasi ekonomi politik sebagai proses penaklukan, hegemoni, dominasi dan koptasi kekuasaan atas desa diiringi dengan eksploitasi terhadap modal akibat ekspansi dan perluasan usaha perusahaan domestik dan internasional yang kolaboratif dengan penguasa dan mencaplok sumberdaya yang ada di desa. Pemerintah di negara-negara tersebut tampil sebagai pengawas atas lalulintas sumber daya (barang dan manusia) dari desa ke kota.

Indonesia, yang termasuk salah satu negara tempat modernisasi ekonomi politik yang luar biasa dijalankan di bawah pemerintahan Orde Baru, menampilkan bekerjanya sistem kekuasaan dan modal yang mencengkram masyarakat dan seluruh sistem serta cara pertanian di daerah pedesaan. Saat ini, dari 215 juta jiwa penduduk Indonesia yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Papua, Sulawesi dan di pelosok pulau-pulau kecil ada sekitar 40 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 60% lebih di antaranya tinggal di daerah pedesaan dan bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang barang-barang konsumsi rumah tangga.⁶ Berdasarkan data FAO tahun 1997-1999, ada sekitar 12 juta penduduk Indonesia menderita rawan pangan, 26 persen balita berada di bawah berat badan normal tahun 1995-2000 dengan tingkat kematian 35 persen untuk tahun 2000. Tentang ini, UNICEF tahun 2000 pernah melaporkan bahwa lebih dari 10 juta anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Dari 300 ribu

anak balita, 180 ribu jiwa di antaranya meninggal karena kekurangan gizi.

Dari data-data tersebut, tampaknya modernisasi ekonomi politik yang dijalankan selama Orde Baru hanya menghasilkan peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan, meluasnya kondisi kekurangan gizi di kalangan anak-anak balita, dan menghasilkan rawan pangan di daerah pedesaan. Sistem dan cara pertanian tradisional yang dipaksa digantikan dengan sistem dan cara pertanian modern di era Orde Baru melalui kebijakan Revolusi Hijau tidak menunjukkan perubahan kesejahteraan hidup petani di daerah pedesaan. Penggunaan pupuk kimia, petisida, dan sebagainya tidak mengakibatkan hasil pertanian semakin berlimpah tetapi menciptakan hama wereng di daerah pedesaan, yang sulit ditangani oleh petani sendiri. Petani di daerah pedesaan pada akhirnya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari ini saja, tidak untuk menabung dan tidak mengantisipasi situasi paceklik di musim kemarau.⁷ Akibatnya seperti apa yang dikatakan oleh Tawney, petani di Indonesia sama dengan petani di Cina dan Vietnam. Petani di ketiga negara ini ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkan mereka.⁸ Musim paceklik dan kondisi rawan pangan yang tidak terlalu besar pun sudah cukup menjadi bahaya yang dapat menenggelamkan masyarakat desa di Indonesia.

Sejauh ini, pemerintah telah menggalakkan berbagai program modernisasi ekonomi politik untuk mengatasi rawan pangan dan kemiskinan. Berbagai program ekonomi dan

⁶ Data-data tersebut merupakan cuplikan dari publikasi data yang ditulis oleh Kompas, 11 Juni 2002 lalu, tentang jumlah penduduk tahun 2002 dan peningkatan penduduk Indonesia yang miskin.

⁷ Lihat, James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani-Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.

politik untuk mengentaskan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah, seperti: Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT, PMTAS, dan P4K. Implementasi program-program tersebut, pernah memberikan keharuman nama mantan Presiden Soeharto, dan karenanya sempat ia menerima penghargaan karena dinilai FAO sukses mengatasi persoalan rawan pangan di Indonesia. Kebijakan modernisasi ekonomi politik pedesaan juga yang menyebabkan Presiden Soeharto tahun 1980-an dijuluki sebagai "bapak pembangunan". Modernisasi ekonomi politik pada zaman pemerintahan Habibie dibingkai dalam program "Jaring Pengaman Sosial" (JPS). JPS menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam mengatasi rawan pangan, kemiskinan, kelaparan dan pengangguran, tetapi karena banyaknya pelaku korupsi dan belum ditegakkannya hukum maka *output* dari program tersebut hangus bersamaan dengan pergantian rezim, yang sudah mencapai babak kedua setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Mudah ditebak mengapa sampai dengan sekarang ini kebijakan modernisasi ekonomi politik pedesaan kurang berhasil. *Pertama*, kebijakan politik *floating mass* yang diterapkan Orde Baru memarjinalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Keputusan penting tentang pembangunan pedesaan jarang melibatkan petani. Kebijakan pembangunan dirumuskan secara *top down* (dari atas), dibuat oleh para teknokrat pusat, dan kurang mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat pedesaan. Contoh yang nyata adalah kebijakan pemerintah pusat tentang kewajiban bagi masyarakat pedesaan untuk menanam produk unggulan, seperti padi yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) di Filipina, yang dikendalikan *Consultative Group on International Agricultural* di bawah Bank Dunia.

menikmati hasil panen yang berlimpah, tetapi malah direpotkan oleh kehadiran hama weru menyebabkan petani mengalami gagal panen. Demikian juga dengan pengenalan kebijakan Revolusi Hijau yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1980-an yang dipelopori oleh *International Centre for Wheat And Maize Improvement* (Pusat Pemuliaan Jagung dan Gandum Internasional), yang berada di Meksiko menggeser penggunaan pupuk organik kompos dan pupuk alam yang diciptakan oleh petani di daerah pedesaan untuk digantikan oleh penggunaan bahan kimia, pestisida, urea dan sebagainya. Hasil dari kebijakan tersebut (yang terkesan dipaksakan kepada petani) menyebabkan hasil panen mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Petani yang terbiasa dengan sistem pertanian tradisional mengalami kesulitan untuk membeli pupuk dengan harga yang seandainya dipermainkan oleh para produsen.

Kedua, modernisasi pembangunan ekonomi pedesaan selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pemupukan konglomerat, dan pembangunan sektor industri yang berpusat di daerah perkotaan, menjadikan desa tertinggal jauh dibandingkan dengan kota. Harapan terjadinya proses menetes ke desa tidak terwujud. Sebaliknya, penduduk desa ramai-ramai berurbanisasi ke kota dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal dan informal. Akibatnya, kota menjadi penuh dengan "bondo nekat" yang ramai-ramai datang ke kota (Jakarta), tanpa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa bekerja di sektor industri, manufaktur, otomotif perbankan dan sebagainya yang tersedia di kota. Jakarta (misalnya), telah menjadi kota yang penuh dengan pendatang dari desa. Pemandangan seperti ini bukan hanya membuat Gubernur Sutyoso kerepotan melakukan

sebagai kota metropolitan, pusat pendidikan, pusat budaya, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat manusia-manusia berkualitas.

Ketiga, modernisasi ekonomi politik mengharuskan pemerintah pusat memaksa masyarakat desa untuk menyediakan pasokan barang-barang mentah yang diperlukan oleh industri-industri di daerah perkotaan. Sebelum sampai ke kota, barang-barang produksi pertanian itu setengah mati diangkut dari desa, karena petani kesulitan membiayai transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan suprastruktur dan infrastruktur pedesaan menyebabkan petani sulit menjual hasil pertaniannya ke kota. Situasi ini bisa ditemui dengan begitu mudah di daerah pedesaan Indonesia Timur, seperti NTT, NTB, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan yang sangat jauh dari perhatian pemerintah pusat.

Dalam segmen kebijakan, modernisasi ekonomi politik pedesaan selama ini menempatkan pemerintah pusat sebagai sentrum kebijakan ekonomi politik. Seluruh dana dan alokasi anggaran pembangunan ditentukan seenaknya oleh pemerintah pusat. Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, sangat tergantung pada kehendak baik (*good will*) pemerintah pusat. Akibatnya, dana dan alokasi anggaran pembangunan tersendat di lingkaran para elite pengambil keputusan, mulai dari tingkat pusat hingga ke desa. Korupsi, kolusi dan nepotisme merebak luas. Hal ini diperparah oleh lemahnya institusi yang berfungsi untuk menerapkan hukum. Modernisasi sistem politik dalam bentuk "otonomi daerah", tidak banyak memberikan harapan terhadap perbaikan nasib dan kemiskinan masyarakat desa. Masyarakat desa tetap miskin di bawah sistem otonomi daerah.

partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam sistem pemerintahan daerah.

Korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjalar di daerah dan anehnya tidak ada ruang bagi masyarakat desa untuk menuntut pelaku korupsi diseret ke pengadilan, karena otonomi daerah tidak memberikan tempat bagi masyarakat desa untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah daerahnya sendiri. Dengan kata lain, modernisasi politik dalam bentuk desentralisasi hanya memperkokoh perpindahan sentralisasi dari pusat ke daerah. Kini pemerintah daerah telah menjadi sentra pembangunan ekonomi politik. Pemerintah daerah juga telah muncul sebagai pengawas yang intens atas kehidupan masyarakat desa. Kalau dulu desa dieksploitasi oleh pusat, maka sekarang desa dieksploitasi oleh kabupaten. Apapun yang dilakukan oleh desa saat ini tidak luput dari pengawasan kabupaten yang menganggap diri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Tulisan ini ingin menjawab persoalan bagaimana proses modernisasi ekonomi politik selama ini telah menciptakan ketergantungan desa kepada kota, dan bagaimana proses modernisasi ekonomi politik itu dilakukan sehingga menempatkan desa sebagai wilayah yang miskin, terbelakang, dan marginal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Penulis juga ingin menjawab permasalahan mengapa ekspansi kekuasaan (politik) dan modal (kekayaan) mencaplok seluruh hajad hidup orang banyak di desa. Secara sistematis, tulisan ini akan diawali dengan pengenalan singkat ke modernisasi ekonomi politik, dilanjutkan dengan modernisasi ekonomi politik di Indonesia, dan terakhir akan membicarakan tentang agenda pembaharuan desa. Tujuannya adalah: *Pertama*, mengetahui bagaimana proses modernisasi ekonomi politik pedesaan yang

modernisasi ekonomi politik di Indonesia menciptakan ketergantungan desa terhadap kota. Dan, *ketiga*, mengetahui bagaimana modernisasi ekonomi politik pedesaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Modernisasi Ekonomi Politik

Modernisasi merupakan sebuah proses yang melibatkan bangsa-bangsa. Manifestasi dari proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 dalam apa yang disebut Revolusi Industri. Sejak itu modernisasi meluas ke seluruh dunia, hingga sampai ke Indonesia pada awal abad ke-20. Aspek yang paling spektakuler dari modernisasi adalah pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang tertampung dalam pengertian Revolusi Industri.⁹ Akan tetapi proses yang disebut Revolusi Industri itu hanyalah salah satu aspek saja dari modernisasi. Modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi, suatu perubahan dalam segala aspeknya.¹⁰ Di bidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar-besaran, tempat diproduksikannya barang-barang konsumsi dan barang-barang sarana konsumsi secara massal. Adanya kompleks-kompleks industri mengandung implikasi adanya organisasi-organisasi yang kompleks untuk mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan proses produksi itu, dan untuk pembelian bahan-bahan baku, serta untuk penjualan produknya. Adanya

spesialisasi produksi secara massal itu hampir mungkin karena adanya pasaran nasional dan internasional untuk modal, bahan baku, barang dan tenaga.¹¹

Dampak modernisasi di bidang ekonomi memunculkan perkembangan industri yang pada gilirannya berkaitan dengan perkembangan agraria yang menyebabkan produksi pekerjaan sebagian kecil penduduk cukup untuk keperluan sisa penduduk yang bekerja di sektor ekonomi yang lain. Modernisasi ekonomi mengharuskan penerapan metode dan teknik yang baru, memperluas ukuran rata-rata usaha tani sehingga produksi agraria per pekerja berhadapan ditingkatkan secara luar biasa. Ini hampir mungkin apabila penduduk yang berasal dari sektor agraria dapat memperoleh pekerjaan di luar sektor pertanian.¹² Modernisasi ekonomi mendorong peralihan sistem dan cara kerja manusia petani menjadi sistem dan cara kerja manusia industri. Peralihan sistem dan cara kerja diikuti oleh perubahan fungsi manusia sebagai tenaga kerja. Modernisasi mengharuskan perubahan fungsi petani penggarap sawah dan buruh tani menjadi buruh konstruksi bangunan industri, pabrik, dan bekerja semata-mata untuk mengakumulasi modal dan memupuk keuntungan bagi dirinya sendiri tetapi bukan pemilik modal, kaum terpelajar dan mereka yang memiliki pabrik.

Modernisasi dalam bidang ekonomi membutuhkan modernisasi sistem politik yang

⁹ Prof. Dr. J.W.Schoorl, 1991. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.1

¹⁰ D.E.Apter, 1968. *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

¹¹ Kebutuhan akan ketersediaan pasar yang memadai bagi ekspansi kapital merupakan aspek mendasar dari modernisasi. Dengan kata lain, modernisasi ekonomi mengharuskan adanya keputusan politik untuk memberikan kelonggaran terhadap ketersediaan pasar.

¹² Implikasi pertama dari modernisasi adalah keharusan bagi pekerja-pekerja di sektor pertanian untuk berpindah kerja ke sektor-sektor industri. Petani penggarap sawah dan buruh tani akan berubah menjadi buruh di pabrik.

relatif cepat tanggap dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhan modal, ekspansi produksi, dan perluasan industri¹³. Di negara-negara liberal ekspansi modal diserahkan sepenuhnya kepada pasar, sementara negara hanya mengambil bagian penting di dalam menciptakan sistem politik yang sehat, membuka ruang kompetisi bagi semua masyarakat untuk bersaing, menyerahkan sepenuhnya pada kinerja pasar, borjuasi dan kaum pemodal, dan memperkecil keterlibatan negara di dalam mengontrol dan mengawasi pasar, lalu lintas modal dan borjuasi.¹⁴ Birokrasi pemerintah yang kecil, efektif, dan efisien dibutuhkan untuk memberikan ruang gerak yang cepat kepada arus lalu-lintas barang, modal dan usaha di pasar. Sebaliknya di negara-negara sosialis (juga komunis) dan negara-negara yang sering disebut dengan *regulatory state*, modernisasi sistem politik melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dengan melakukan sentralisasi, pengawasan-pengawasan atas lalu lintas modal, intervensi sistem politik terhadap kinerja modal, pasar dan borjuasi, dan melakukan korporatisasi atas sejumlah lembaga negara yang berperan dalam mengambil kebijakan ekonomi¹⁵. Dalam konteks modernisasi politik, birokrasi pemerintah merupakan instrumen utama yang melakukan pengawasan-pengawasan dan sekaligus menjadi instrumen pembangunan¹⁶. Pertumbuhan masyarakat industri yang modern, kompleks, dengan diferensiasi yang besar

membutuhkan birokrasi pemerintah yang juga sangat besar, mendorong pengambilan keputusan secara rasional, menumbuhkan hubungan-hubungan sosial yang tidak berdasarkan perorangan, tugas-tugas dijadikan bersifat rutin dan tersentralisasi. Dalam konteks modernisasi, birokrasi yang dibutuhkan adalah: (1) hubungan antara pejabat yang diangkat diatur dengan ketentuan hukum, (2) terdapat sentralisasi jabatan yang disusun secara hierarkis, (3) pengangkatan dan kenaikan tingkat didasarkan atas persetujuan kontraktual, (4) pengangkatan didasarkan atas kecakapan-kecakapan teknik tertentu yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau pendidikan tertentu, (5) gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan, (6) ada pemisahan yang tegas antara jabatan dengan kepentingan pribadi, jabatan tidak boleh membawa penghasilan lain, kecuali yang ditetapkan oleh peraturan gaji, (7) jabatan itu merupakan lapangan kerja penuh, (8) tugas dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tanpa pandang bulu. Berkaitan dengan modernisasi politik ini Donald K. Emerson mengatakan bahwa birokrasi diperlukan untuk mendukung modernisasi ekonomi. Karena itu menurut Emerson, proses rekrutmen dalam birokrasi pemerintah harus didasarkan atas tiga "K", yakni kapabilitas, kompatibilitas, dan kompetensi.¹⁷

Dalam praktiknya, modernisasi ekonomi politik yang dijalankan oleh bangsa-bangsa tidak selalu berjalan seiring dengan praktik

¹³ Bdk dengan Samuel P. Huntington dalam, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1996.

¹⁴ Frans Magnis Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.

¹⁵ M. Fainsod, 1967. *Bureaucracy and Modernization: The Russian and Soviet Case*.

¹⁶ Donald K. Emerson, 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*. Ithaca: Cornell University Press. Dalam buku ini Emerson menekankan pentingnya tiga "K" dalam birokrasi pemerintah yang rasional yakni kapabilitas, kompatibilitas dan kompetensi. Ketiganya menurut Emerson diabaikan oleh pemerintah

birokrasi (politik) yang sehat, yang didasarkan atas ciri-ciri yang rasional menurut Emerson di atas. Dalam hal pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian tugas, dan sebagainya, hubungan pribadi dan klientelisme lebih banyak berperan. Patronase dan kompromi ekonomi lebih menonjol ketimbang rasionalitas atas fungsi dan diferensiasi tugas-tugas yang menurut Weber merupakan hukum mutlak bagi negara-negara modern. Selanjutnya, hubungan *patron client* dipelihara untuk menumbuhkan kepatuhan dan kesetiaan terhadap kekuasaan.

Di sini, modernisasi ekonomi politik telah menciptakan hubungan simbiosis antara birokrat dan pengusaha. Riggs yang berbicara tentang pengusaha paria mengatakan bahwa modernisasi ekonomi politik menghasilkan kerjasama antagonistik antara pegawai pemerintah dengan pengusaha swasta. Si pegawai menambah penghasilan resminya yang tidak mencukupi dan sebagai imbalan si pengusaha dibiarkan melanggar peraturan.

Di Indonesia, modernisasi ekonomi politik menunjukkan dua dimensi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Dimensi pertama mencakup ekspansi kekuasaan politik (negara) dan dimensi yang kedua adalah perluasan modal (kekayaan borjuasi domestik dan internasional). Keduanya berjalan seiring. Ekspansi kekuasaan politik mendorong atau membuka jalan masuknya ekspansi borjuasi ke daerah pedesaan. Kekuasaan politik diperlukan untuk memberikan jalan mulus masuknya kapital ke desa melalui lisensi, proteksi dan pemberian izin usaha yang mendorong ekspansi modal secara besar-besaran ke daerah pedesaan. Jika kekuasaan politik memberikan garansi lisensi, proteksi dan izin usaha terhadap para borjuasi domestik, maka

para borjuasi memberikan dukungan, kepatuhan dan loyalitas dalam bentuk menyumbang sebagian modal hasil *spolis* dan eksploitasi seluruh sumber daya yang ada di desa. Kekuasaan politik misalnya memberikan kepada pengusaha Bob Hassan untuk menggarap Hutan Tanaman Industri (HTI) di desa-desa di Kalimantan, sementara Bob Hassan menjamin kebaikan hati kekuasaan politik itu dengan menyumbangkan sebagian hasil HTI. Demikian pun dengan Freeport perusahaan-perusahaan multinasional dan lainnya. Pola hubungan *patron-client* dipelihara untuk menjalin kesetiaan dan kepatuhan terhadap kekuasaan Orde Baru. Rekrutmen birokrasi dari aras desa hingga ke pusat tidak didasarkan atas tiga "K", tetapi didasarkan atas bekerjanya sistem hadiah dan hukuman atau *carrot and stick*. Hadiah (pengangkatan) diberikan kepada birokrat yang loyal dan patuh sementara hukuman (tidak diangkat) diberikan kepada mereka yang memiliki peluang menjadi pembangkang. Sistem LITSUS digunakan sebagai instrumen untuk membersihkan dan memisahkan calon pegawai yang patuh dengan calon pegawai yang tidak loyal. Dengan demikian modernisasi ekonomi maupun politik bertujuan memperbesar arus modal (untuk kekuasaan dan borjuasi) dan untuk melestarikan legitimasi kekuasaan.

Berikuti ini merupakan gambaran bagaimana modernisasi ekonomi politik di Indonesia menunjukkan dominasi ranah kekuasaan dan modal yang pada gilirannya menjadikan desa sebagai "tumbal" yang selidikorbankan untuk kepentingan kekuasaan, investasi, dan menyelamatkan muka kelompok borjuasi. Kelompok borjuasi ini, seperti yang dikatakan oleh Riggs,¹⁸ menjalin hubungan

¹⁸ F.W.Riggs, 1996, *Bureaucrats and Political Development: A Paradoxical View*, dalam La Palombara, 1996, hal. 100.

simbiosis dengan penguasa untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang ada di desa atas nama “modernisasi”, yang dalam konteks ini tentu saja merupakan bagian dari pentingnya bahan mentah untuk kebutuhan industri, pabrik, konstruksi, dan sebagainya. Hegemoni dan dominasi kekuasaan diperlukan untuk mengawasi, memantau, dan mengontrol lalu lintas modal (uang, barang, dan jasa), tidak semata-mata untuk melestarikan kepentingan borjuasi domestik, tetapi juga dalam rangka memelihara kekuasaan politik.

Modernisasi Ekonomi Politik Indonesia

Modernisasi ekonomi politik di Indonesia, sudah dirintis sejak masa kolonial. Sistem tanam paksa yang dijalankan di bawah pemerintahan kolonial Belanda, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai *nation state*, bisa dinilai sebagai fase historis bekerjanya sistem modernisasi itu. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai model awal masuknya modernisasi ekonomi politik di Indonesia dapat dilihat dari cara pemerintah kolonial memaksa para petani di daerah pedesaan menanam sejumlah tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri dan investasi modal.¹⁹ Sejumlah areal tanah di daerah pedesaan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipaksa untuk ditanami sejumlah tanaman industri — seperti tebu dan teh — semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri (modal). Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda juga mendorong perubahan fungsi petani pedesaan. Para petani, yang sebelum sistem tanam paksa diselenggarakan, berfungsi sebagai pekerja

yang menyediakan kebutuhannya sendiri (baik petani penggarap maupun buruh tani) berubah menjadi buruh pabrik yang bekerja untuk kepentingan industri. Ini merupakan babak awal peralihan petani di Indonesia dari petani yang bekerja di sektor domestik untuk kepentingan keluarga menjadi buruh pabrik yang menyediakan kebutuhan industri dan perdagangan pemerintah kolonial. Para petani dieksploitasi tidak hanya tenaga fisiknya, tetapi juga lahan pertaniannya yang dijadikan sebagai jaminan bagi kepentingan industri dan pabrik pemerintah kolonial. Di bawah UU Agraria yang dibuat oleh pemerintah kolonial, pengusaha Barat mulai mencaplok dan menyewa tanah-tanah di daerah pedesaan (Jawa) untuk ditanami tanaman industri. *Woeste gronden*²⁰ merupakan sebutan halus yang digunakan pemerintah kolonial untuk mengambil paksa tanah-tanah petani guna menghindari terjadinya keributan, pemberontakan, dan perlawanan yang dilakukan oleh petani yang tanahnya diambil paksa oleh pemerintah kolonial.

Modernisasi ekonomi politik kolonial dijalankan juga dengan mendorong pabrik-pabrik agar mencaplok tanah-tanah pertanian di daerah pedesaan dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah *woeste gronden* yang tidak dapat dipergunakan oleh petani pribumi. Kekuasaan (politik) diperlukan untuk melakukan koersi, restriksi, pengawasan dan tekanan atas fisik petani dan memaksa para petani memberikan lahan mereka untuk kepentingan industri sekaligus menciptakan kebungkaman di kalangan petani. Kekuasaan juga diperlukan tidak hanya untuk mengawasi lalu lintas ketersediaan tenaga fisik petani untuk melayani kebutuhan pekerjaan di lahan tanam

¹⁹ Lihat, J. Thomas Lindbland (eds), 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jelasnya lihat, R.E. Elson, *Dari State ke State: Rezim yang Berubah dari Produksi Ekspor Petani Pada*

paksa dan pengambilalihan lahan para petani, tetapi juga dalam rangka mengontrol dan mengendalikan munculnya perlawanan dan pemberontakan kaum petani di daerah pedesaan.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, terutama sekali di bawah pemerintahan Orde Baru, modernisasi ekonomi politik pedesaan di Indonesia memiliki kecenderungan yang sama dengan modernisasi ekonomi politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Sistem dan cara pertanian dipaksakan berubah dari cara dan sistem pertanian tradisional ke sistem dan cara pertanian modern. PELITA I Orde Baru yang meletakkan strategi pembangunannya pada pembangunan pertanian membawa banyak sekali teknologi baru, khususnya teknologi padi, ke desa. Pengenalan dan adopsi teknologi ini telah menimbulkan revolusi dalam banyak bidang di daerah pedesaan, tidak hanya revolusi dalam bidang produksi padi, tetapi juga revolusi dalam bidang pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.²¹

Di bidang produksi, adopsi jenis bibit padi baru yang dianggap unggul, berumur pendek, tanggap terhadap dosis pupuk yang besar, dan kematangan yang lebih serentak telah mengakibatkan berkembangnya komersialisasi produksi, pengolahan, dan pemasaran barang-barang pertanian (padi). Meluasnya penggunaan sabit dan sistem tebasan juga erat kaitannya dengan kehadiran bibit unggul tersebut. Melalui BIMAS (Bimbingan Massal), Orde Baru memperkenalkan kepada petani sistem dan cara baru penggunaan bibit unggul, pestisida, urea, dan sebagainya. Atas nama BIMAS, ruang-ruang publik di desa diisi dengan wacana pembangunan, ideologi politik, tertib sosial dan sebagainya. Bahkan BIMAS juga

dipakai untuk memaksa dan menggiring pe-
pedesaan ikut ambil bagian di dalam prog-
Keluarga Berencana (KB). Program K-
samping menuai banyak kesuksesan da-
menekan laju pertumbuhan penduduk, j-
menerapkan besarnya cengkraman keuas-
Orde Baru atas masyarakat desa. KB kemu-
dipelestick menjadi "Keluarga Bapak" y-
artinya para peserta KB (akseptor k-
merupakan anggota besar keluarga Orde B-
(Soeharto) yang menjamin kepatuhan
ketundukan terhadap kehendak bapak.

Perubahan sistem dan cara pertan-
yang diperkenalkan oleh pemerintah Orde B-
bukan bagi peningkatan produktivitas ha-
hasil pertanian dan dengan begitu menaik-
kesejahteraan hidup petani, adalah upaya dal-
kerangka mempersiapkan petani (terutama
daerah pedesaan) untuk menerima ekspa-
modal sebagai jaminan bagi perlintung
kekuasaan (politik) Orde Baru. Masuknya mo-
ke daerah pedesaan bisa dilihat d-
penggunaan mesin tumbuk padi (*huller*) b-
untuk pengelolaan padi, yang tentu saja dimil-
oleh wiraswasta dan pemodal di desa. Deng-
begitu petani pedesaan (Jawa) tet-
menghadapi masalah yang paling hakiki, ya-
rendahnya pendapatan dan sempitn
kesempatan kerja.²² Persoalan ini diatasi ol-
pemerintah Orde Baru dengan membuka lah
transmigrasi dan mendorong semakin bany
orang desa berurbanisasi ke kota deng
harapan di daerah transmigrasi baru di kota d-
mereka akan mendapatkan kehidupan ya-
lebih layak. Tetapi sekali lagi, para petani i-
tetap saja menjadi tumbal kekuasaan polit
yang ingin berekspansi ke daerah kekuasaan ba-
dalam rangka memperluas basis kekuasaa
Sebaliknya perpindahan petani ke kota (Jakart

²¹ Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta: Liberty.

tidak selalu sejalan dengan harapan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Para petani urban ini secara tidak sadar dipersiapkan oleh Orde Baru untuk menopang perluasan kapital, industri dan pabrik yang ada di kota. Tenaga-tenaga mereka sangat diperlukan oleh karena di samping biayanya sangat murah juga secara politik mereka mudah untuk dimanfaatkan demi kepentingan kekuasaan. Semuanya dilakukan dalam kerangka memperbesar modal yang akan mendukung basis kekuasaan di daerah perkotaan.

Modal (kekayaan) dan sumber-sumber material diyakini oleh pemerintah Orde Baru sebagai instrumen yang sangat efektif untuk melestarikan kekuasaan, menumbuhkan loyalitas dan kesetiaan masyarakat dari desa sampai pusat, *reward* dan *carrot* bagi mereka yang loyal, sekaligus sebagai modal untuk membendung pembangkangan, menaklukkan pemberontakan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melestarikan kekuasaan dari gempuran massa.

Modernisasi ekonomi politik yang dijalankan di bawah kekuasaan Orde Baru, juga dilakukan dengan menerapkan *woeste gronden*. Tanah-tanah pertanian yang subur di daerah pedesaan diambil alih oleh pemerintah dan dicap sebagai tanah milik negara. Para petani diindoktrinasi agar rela menyerahkan tanah-tanah mereka yang paling subur "demi kepentingan negara". Petani yang tidak rela menyerahkan tanahnya begitu saja dianggap sebagai pembangkang yang tidak setia kepada kepentingan negara. Hukumannya adalah dipenjarakan atau dicap sebagai antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI). Di samping memaksa petani menyerahkan tanah-tanahnya untuk kepentingan industri, kapital, dan kekuasaan, para petani di daerah pedesaan juga dipaksa untuk menanam tanaman industri di atas tanah-

tanah mereka. Tebu, teh, kopi, dan sebagainya merupakan tanaman wajib bagi petani untuk menggantikan tanaman padi dan jagung yang dianggap paling layak untuk petani di daerah pedesaan. Akibatnya, petani tidak lagi bekerja untuk kepentingan keluarganya, tetapi semata-mata bekerja untuk kepentingan industri gula, teh, dan kopi. Di sini, proses eksploitasi petani tidak hanya dilakukan terhadap tanah dan tanaman pertanian, tetapi fisik petani itu juga menjadi korban.

Dalam konteks ekonomi marxian telah terjadi peralihan fungsi petani. Petani tidak lagi menjadi buruh tani, petani penggarap, dan sebagainya, tetapi telah berubah menjadi petani pabrik, petani penggarap tanaman pabrik, dan petani penjaga kelestarian industri. Kekuasaan politik dilakukan dengan menekan, menterror, mengintimidasi, mengawasi, merestriksi dan mengkoersi petani. Babinsa merupakan instrumen utama kekuasaan Orde Baru yang digunakan untuk itu. Di samping mengawasi petani, instrumen kekuasaan Orde Baru ini juga dirancang untuk mengawasi lalu-lintas tanaman petani, sehingga bisnis militer berkembang luas dari desa hingga ke kota. Birokrasi pemerintah Orde Baru dirancang secara *rigid*, tersentral, dan terkendali untuk memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya pembangkangan yang berasal dari arus bawah (petani). RT, RW tidak hanya bekerja sebagai administrator atas kelangsungan usaha borjuasi di daerah pedesaan, tetapi juga sebagai agen kekuasaan yang setiap saat melaporkan perkembangan tertib sosial dan stabilitas keamanan. RT, RW ternyata tidak hanya menjadi agen kekuasaan pusat di desa, tetapi juga menjadi agen borjuasi yang menjual pestisida, pupuk urea dan sebagainya kepada petani.²³

Golkar dibiarkan untuk mempenetrasi sampai ke desa demi menjaga dan melestarikan

kepentingan kekuasaan atas modal dan kepatuhan dari kelompok-kelompok sosial di daerah pedesaan. Dengan begitu, modernisasi politik yang dikembangkan oleh Orde Baru adalah politik segmentasi dan bifrontal seperti yang sering dikemukakan oleh O'Donnel. Strategi bifrontal digunakan untuk melakukan proses stasisasi, lewatnya negara menundukkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan privatisasi dengan membuka beberapa lembaganya bagi penyampaian kepentingan masyarakat sipil secara terorganisasi. Strategi segmen ter digunakan untuk: (1) memusatkan proses stasisasi masyarakat kelas bawah (seperti serikat buruh), dan (2) memprivatisasi lembaganya bagi kepentingan kelas atas yang dominan. Singkatnya, perwakilan kepentingan kelas bawah dibatasi, sedangkan perwakilan kepentingan kelas dominan dibolehkan.²⁴

Strategi ini oleh Mohtar Mas'od disebut sebagai memasukkan desa ke dalam negara dan memasukkan negara ke dalam desa. Strategi tersebut adalah: *Pertama*, memasukkan desa ke dalam negara — yang oleh Sutoro Eko disebut negaranisasi — adalah suatu proses penaklukan desa, tidak hanya manusia-manusianya, tetapi juga sumber daya-sumber daya yang ada di desa. Dalam strategi ini, negara bekerjasama dengan pengusaha domestik dan internasional untuk mencaplok semua sumber daya yang ada di desa. Negara bertindak sebagai aktor *predator* yang memberikan kesempatan luas kepada kapital masuk ke desa. Masuknya kapital ke desa yang diberikan jalan lebar melalui lisensi, proteksi, dan pemberian izin yang mudah mendorong ekspansi kapital secara luas. Tanah-tanah pertanian yang subur,

hutan-hutan yang lebat dan barang-barang pertambangan yang ada di desa, dianggap milik negara yang harus dikelola oleh pengusaha domestik dan internasional. Negara kemudian memberikan garansi tertib politik dan stabilitas sosial sebagai jaminan perampasan hak-rakyat oleh pengusaha. Babinsa sekali digunakan untuk mengawasi dan menjaga keamanan eksploitasi sumber daya di desa.

Kedua, memasukkan negara ke dalam desa, digunakan untuk memberikan keleluasaan kepada negara untuk melakukan penetrasi ke ruang publik yang ada di desa. Tujuannya adalah untuk mematahkan perlawanan rakyat yang mungkin sekali waktu dapat muncul. Birokrasi pemerintahan desa diperkaya dengan struktur struktur baru ciptaan negara, seperti: RT, RW, LKMD, LMD, semata-mata untuk memberikan *tools* bermain bagi masyarakat desa.²⁵ RT, RW, LKMD, dan sebagainya diisi dengan berbagai jargon tertib sosial, stabilitas keamanan, pengembangan ideologi pembangunan desa, dan sebagainya dengan tujuan untuk meminabobokkan rakyat pedesaan. Di sini juga telah terjadi penyempitan tugas negara (poli Negara tidak bertanggung jawab atas gangguan tertib sosial di tingkat desa. Melalui pengembangan sistem ronda malam, tugas negara diambil alih oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Dampak dari kedua strategi ini adalah *Pertama*, kekuasaan politik dengan leluasa menciptakan kepatuhan dan ketundukan masyarakat di tingkat paling bawah. *Kedua*, eksploitasi atas sumber-sumber daya di daerah pedesaan berjalan dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah Orde Baru. *Ketiga*, perlawanan d

²⁴ O'Donnell dalam Mochtar Maso'ed, *Ekonomi Dan*

Struktur Politik Orde Baru 1996-1997, LP3RS, Jakarta

1989, hal. 15.

sektor rakyat di lapisan bawah tidak terjadi.

Dengan demikian, modernisasi ekonomi politik yang dijalankan di bawah pemerintahan Orde Baru digunakan untuk : *Pertama*, memperkokoh kekuasaan Orde Baru. *Kedua*, menjamin basis material (kapital) untuk membayar loyalitas dari sektor rakyat. *Ketiga*, memastikan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari sektor rakyat. *Keempat*, meminimalkan partisipasi rakyat pedesaan untuk menjamin tertib sosial, stabilitas keamanan dan roda pembangunan.

Untuk memperkokoh kekuasaannya, Orde Baru melakukan pengendalian ekonomi secara terpusat. Pengendalian ekonomi yang terpusat dapat dilihat dari banjirnya pembentukan lembaga-lembaga perkreditan dan kontrol kelembagaan yang menyertai pemberian dana perkreditan itu. Melalui lembaga-lembaga perkreditan, Orde Baru melakukan kontrol masif terhadap perekonomian rakyat kecil dan menempatkan patron-patron bisnis dan kelompok-kelompok loyalisnya dari pusat hingga ke desa. Kebijakan Kredit Canda Kulak (KCK) yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan pengusaha kecil memang di satu sisi sangat menguntungkan, tetapi di sisi lain justru merugikan. Tahun 1984/1985 misalnya KCK telah mampu mengantongi 13.893.891 nasabah dengan total jumlah kredit Rp.166.861,7 juta dan pada 1987/1988 KCK berhasil menjangkau sekitar 15.984.499 nasabah dengan total kredit Rp. 225.103,0 juta, tetapi kebijakan itu telah menciptakan kontrol dan pengendalian ketat terhadap ruang gerak masyarakat untuk memperoleh dana perkreditan dari badan-badan lain di luar lembaga yang ada.²⁶

Di samping itu, melalui lembaga-lembaga perkreditan, Orde Baru memperluas basis

kekuasaannya, sehingga selalu keluar sebagai pemenang dalam pemilu. Besarnya pengendalian dan pengawasan Orde Baru kepada sektor ekonomi, terutama sektor ekonomi rakyat kecil dapat dilihat dari UU No.12/1969 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang ini memberikan ruang yang luas terhadap pemerintah untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan fasilitas terhadap koperasi. Undang-undang ini diperkuat oleh instruksi Presiden No.2/1978 tentang KUD sebagai wadah dari seluruh warga desa: petani, nelayan, pengerajin, peternak, pedagang dan sebagainya, untuk mengendalikan dan memonopoli hasil-hasil ekonomi di sektor informal. Dengan instruksi ini, KUD telah menjadi lahan monopoli dalam sektor ekonomi kecil dalam berbagai bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri kecil, dan kerajinan.²⁷

Tahun 1984/1985 2.291 unit KUD terlibat dalam pengadaan pangan dengan jumlah beras yang terkumpul sebanyak 2.046,4 ribu ton dan pada tahun 1987/1988 sekitar 1.673 unit KUD terlibat dengan jumlah beras sebanyak 1.136,8 ribu ton. Dalam penyaluran pupuk, tahun 1985 KUD yang menyalurkan pupuk ada sebanyak 3.555 unit dengan jumlah pupuk yang disalurkan sebanyak 143.398 ton, insektisida melibatkan 2365 unit KUD dengan jumlah insektisida yang disalurkan sebanyak 532.167 kg/liter. Pada 1987/1988 KUD yang terlibat dalam penyaluran pupuk meningkat menjadi 1038 unit yang menyalurkan pupuk sebanyak 210.006 ton dan 397 KUD menyalurkan 20.284 kg/liter insektisida. KUD juga terlibat dalam Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Jawa; pada tahun 1984/1985 ada 732 unit KUD menyalurkan kredit sebanyak Rp 149.062,1 juta dan tahun 1987/1988 meningkat

²⁶ Data Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan dan Media Indonesia, 1989-1998. Data-data ini diambil dari hasil penelitian penulis tahun 2001.

lagi menjadi 608 unit KUD dengan penyaluran kredit sebesar Rp 98.426,6 juta.

Dalam sektor perikanan ada sekitar 645 buah KUD (1984/1985) dengan anggota 148.520 orang dan nilai usaha sebesar Rp 71.434 juta pada tahun 1987/1988 meningkat menjadi 669 buah KUD dengan anggota sebanyak 153.369 orang dan nilai usaha sebanyak Rp 88.756 juta. Dalam pertanian KUD menangani penyaluran bibit unggul, makanan ternak, obat-obatan, alat-alat kesehatan ternak, dan pemasaran hasil-hasil peternakan. Jumlah KUD yang terlibat dalam mengelola dan mengoperasikan usaha kerajinan adalah 675 buah beranggotakan 65.201 orang dengan usaha senilai Rp 210.147,3 juta (1984/1985) dan pada 1987 meningkat menjadi 1015 buah KUD dengan anggota sebanyak 200.301 orang mencakup jumlah sebesar Rp 341.709,1 juta. KUD tahu dan tempe (KOPTI) 1987 sebanyak 71 buah KUD dengan anggota 32.357 orang meliputi modal Rp 17.939 juta.

Melalui paket 27 Oktober 1988 dan 25 Maret 1989 Lembaga Dana dan Perkreditan Pedesaan diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sampai dengan 1991 LDKP sudah tersebar di 11 provinsi yaitu : Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di Aceh, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Riau dan Bengkulu, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, BKK di Jawa Tengah, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) di Jawa Timur, BKK di Kalimantan Selatan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, dan LPK di NTB. Jumlah unit LDKP secara keseluruhan mencapai 1.771 unit dengan jumlah modal Rp 33,3 milyar, kredit sebesar Rp 40,2 milyar, dan nasabah sebanyak 1,7 juta orang.²⁸

Bantuan perkreditan itu di satu memang sangat menguntungkan pet nelayan dan pengusaha kecil. Tetapi ada perkreditan semacam ini memberi keleluasaan kepada pemerintah Orde Baru untuk mengontrol, mengendalikan, dan memobilisasi massa di dalamnya untuk tujuan kekuasaan. Melalui lembaga-lembaga perkreditan itu Orde Baru dengan mudah melakukan sosialisasi kekuasaan, termasuk represi dan intimidasi terhadap mereka yang mencoba melawan. Pemberian lisensi, proteksi dan berbagai fasilitas monopoli — seperti pemberian lisensi kepada KUD— semuanya dalam kerangka mendorong ekspansi kapital untuk memperoleh dukungan terhadap kekuasaan Orde Baru.

Agenda Pembaharuan Desa

Dengan proses modernisasi ekonomi seperti digambarkan di atas, bagaimana memformulasi agenda pembaharuan desa? Pembaharuan desa sangat penting untuk mengembalikan otonomi desa, terutama hak-ekonomi dan politik rakyat, yang selama ini dirampas oleh negara. Karena itu agenda adalah memformulasi kembali ruang-ruang ekonomi politik yang selama ini digunakan secara keliru untuk kepentingan kekuasaan. Agenda *pertama* adalah mengembalikan sumber-sumber daya, termasuk tanah yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan negara. *Kedua* mengembalikan hak-ekonomi politik rakyat; ruang-ruang publik yang ada di desa difungsikan kembali dan dikembangkan dengan daya kreasi, inovasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya yang khas rakyat pedesaan. Reformulasi strategi ini sangat penting demi menata kembali desa yang selama ini telah menjadi korban berbagai kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, Hans. 2002. *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lapera.
- Apter, D.E. 1968. *Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization*. Prentice Hall: Englewood Cliffs
- Emerson, Donald K. 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*. Ithaca: Cornell University Press
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Fainsod, M. 1967. *Bureaucracy and Modernization: The Russian and Soviet Case*
- Fakih, Mansour, 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press
- Huntington, Samuel P. 1996. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman - Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Kasryno, Faisal dan Joseph F. Stepanek. 1985. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Gramedia.
- Lindbland, J. Thomas. (eds). 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maso'ed, Mochtar. 1989. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1996-1997*. Jakarta: LP3RS.
- Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo. 1998. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Riggs, F.W. 1967. *Bureaucrats and Political Development: A Paradoxical View*.
- _____. 1996. *Administrasi Negara-Negara Berkembang-Teori Masyarakat Prismatis*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Schoorl, J.W. 1991. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, James C. 1986. *Moral Ekonomi Petani-Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Frans Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Tawney, R.H. 1996. *Land and Labor in China*. Boston: Beacon Press.